

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Sektor pertanian jika ditinjau dari struktur perekonomian nasional menunjukkan bahwa sektor pertanian menempati posisi yang penting dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2008 semua sektor mengalami penurunan, kecuali sektor pertanian, sektor industri dan konstruksi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB riil pada empat tahun terakhir ini yaitu tahun 2007 – 2010 juga selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1  
Kontribusi Tiga Sektor Utama Terhadap PDB riil, 2007 – 2010  
(Persen, %)**

SEKTOR	Kontribusi			
	2007	2008	2009	2010
Pertanian	13,7%	14,5%	15,3%	15,7%
Industri	27,0%	27,9%	26,4%	24,8%
Perdagangan, hotel&restoran	15,0%	14,0%	13,4%	13,7%

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi, Data diolah, dari tahun 2007 - 2010

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sektor pertanian memberikan peningkatan dalam kontribusinya terhadap PDB riil. Pada tahun 2009, ketika dua sektor utama lainnya mengalami penurunan justru sektor pertanian mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar 14,5 persen pada tahun 2009 menjadi 15,3 persen.

Jika ditinjau dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2009 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 41,61 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia, angka tersebut tertinggi di antara sektor lainnya. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2009 juga tertinggi kedua setelah sektor industri yaitu sebesar 15,3 persen terhadap PDB riil pada tahun 2009. Pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB riil masih di bawah sektor industri, namun sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja paling tinggi di antara sektor lainnya yaitu sebesar 43,47 persen. Pada tahun 2010, ketika sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja paling tinggi yaitu sebesar 43,47 persen, ternyata sektor pertanian menghasilkan penduduk miskin sebesar 64,23 persen dari total penduduk miskin tahun 2010 (BPS, 2010).

Permasalahan lain pada sektor pertanian adalah distribusi lahan yang timpang, rendahnya tingkat pendidikan petani, rendahnya aksesibilitas terhadap modal dan jaringan pemasaran yang tidak menguntungkan petani. Salah satu faktor penyebab kemiskinan di sektor pertanian adalah rendahnya distribusi lahan pertanian yang semakin timpang. Tabel 1.2 berikut ini memaparkan distribusi rumah tangga petani menurut luas lahan.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Rumah Tangga Petani Menurut Luas Lahan, 2008 – 2010**  
**(Persen, %)**

Luas Lahan (hektoare)	2008	2009	2010
< 0,5	46,2	47,7	56,4
≥ 0,5	24,1	22,4	18,4

Sumber: BPS, Data Diolah, berbagai edisi

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pertanian di Indonesia didominasi oleh petani skala kecil. Pada tahun 2008, jumlah petani gurem (petani dengan luas

garapan kurang dari 0,5 ha) berjumlah 46,2 persen dari keseluruhan petani. Pada tahun 2009, jumlah petani gurem meningkat menjadi 47,7 persen dari keseluruhan petani. Jumlah petani gurem pada tahun 2010 meningkat cukup tinggi menjadi 56,4 persen. Para petani yang mengolah lahan kurang dari 1 hektare (ha) diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan hidup keluarganya (Arsyad, 2010).

Tingkat pendidikan juga merupakan satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yang dialami oleh para petani. Perkembangan di sektor pertanian, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, petani di negara kita rata – rata adalah lulusan dari Sekolah Dasar (SD), sehingga pengetahuan mereka masih sangat kurang dalam manajemen hasil pertanian ataupun pengetahuan dalam mengembangkan sektor pertanian. Para petani lulusan SD lebih mengandalkan cara tradisional dalam mengembangkan pertanian serta dalam manajemen hasil pertanian. Salah satu contoh nyata para petani masih mengandalkan cara tradisional yaitu para petani masih mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil produksinya.

Tabel 1.3 di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 – 2010 sebagian besar petani di Indonesia merupakan lulusan SD. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa petani yang lulusan SD pada tahun 2008 sebesar 55,33 persen. Pada tahun 2009 petani lulusan SD sebesar 55,21 persen dan pada tahun 2010 sebesar 54,51 persen pada tahun 2010. Petani yang berpendidikan sarjana hanya sebesar 4,15 persen

pada tahun 2008, pada tahun 2009 sebesar 4,66 persen dan 5,25 persen pada tahun 2010.

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Petani Menurut Tingkat Pendidikan Formal, 2008 – 2010**  
**(Persen, %)**

Tingkat Pendidikan Formal	2008	2009	2010
Sekolah Dasar ke bawah	55,33	55,21	54,51
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	19,04	19,39	20,63
Sekolah Menengah Atas (SMA)	14,39	14,58	15,92
Diploma	2,87	2,79	3,02
Sarjana	4,15	4,66	5,25

Sumber: BPS, Data Diolah, 2009-2011

Permasalahan pertanian yang lain adalah rendahnya aksesibilitas terhadap modal dan jaringan pemasaran yang tidak menguntungkan petani (Arsyad, 2010). Para petani masih sulit untuk mendapatkan kredit modal dari perbankan. Pihak perbankan tidak mau memberi kredit terhadap para petani karena resiko di sektor pertanian masih sangat besar seperti resiko gagal panen karena bencana alam, hama dan sebagainya. Perbankan menilai resiko kredit macet sangat tinggi jika mereka meminjamkan dana untuk modal para petani.

Permasalahan lainnya adalah jaringan pemasaran, para petani masih mengandalkan tengkulak. Hal tersebut dikarenakan para petani masih kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai tempat untuk menjual hasil produksi pertaniannya. Selain itu, mereka memilih tengkulak dikarenakan tengkulak dapat memberi mereka pinjaman uang terlebih dahulu. Kita semua mengetahui bahwa tengkulak selalu membeli hasil produksi petani dengan harga yang rendah, sehingga sangat merugikan petani.

Permasalahan – permasalahan di atas juga dialami oleh salah satu kabupaten di Provinsi DIY, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat dari luas lahannya, Kulon Progo merupakan daerah pertanian. Hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 1.4 di bawah ini. Tabel 1.4 menginformasikan luas lahan pertanian di Provinsi Yogyakarta menurut kabupaten/ kota, dari tabel tersebut kita dapat melihat luas wilayah lahan pertanian di kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 1.4**  
**Luas Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta, tahun 2008, (Hektoare, Ha)**

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian
Kulon Progo	45.360
Bantul	29.319
Gunung Kidul	112.435
Sleman	39.618
Yogyakarta	419

Sumber: BPS, Data Diolah tahun 2008

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kulon Progo terluas kedua setelah Gunung Kidul, yaitu sebesar 45.360 ha. Selain itu, penduduk Kulon Progo mayoritas masih berusaha pada sektor pertanian yaitu sebesar 78 persen atau 80.685 rumah tangga pertanian dari 103.450 rumah tangga yang ada di kabupaten Kulon Progo. Tingkat kesejahteraan petani di Kulon Progo dapat dikatakan belum sejahtera, karena dari 80.685 rumah tangga pertanian tersebut, sebesar 61.760 rumah tangga atau 76,5 persen merupakan rumah tangga petani gurem dengan tingkat pendidikan yang rendah. Para petani juga masih banyak mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil pertaniannya serta untuk mendapatkan pinjaman modal.

Salah satu desa di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yang menarik untuk diteliti adalah Desa Banaran. Desa Banaran bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga sebagian besar daerah di Desa Banaran terletak di sepanjang pesisir pantai Trisik. Para petani yang berada di sepanjang pesisir pantai Trisik ini merupakan petani lahan pasir yang lahan tersebut merupakan tanah PAG (*Paku Alam Ground*). Tanah Paku Alam Ground merupakan lahan yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta, sehingga para petani yang berada di Desa Banaran bagian selatan tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan pertaniannya.

Kepemilikan lahan menjadi sangat penting karena petani yang tidak memiliki hak kepemilikan lahan ketika suatu saat lahan diminta oleh pemiliknya maka petani akan kehilangan pekerjaan. Hasil survei di lapangan juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani di Banaran juga rendah, mayoritas para petani di Banaran adalah lulusan SD. Luas lahan pertanian di Banaran juga relatif kecil, hal ini tercermin dari sempitnya luas wilayah Kecamatan Galur dimana Banaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Galur. Tabel 1.5 menunjukkan luas wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kecamatan.

Tabel 1.5 di bawah ini menunjukkan bahwa Galur merupakan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil kedua jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 5,61 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Banaran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Galur, namun walaupun luas wilayahnya kecil,

pendidikan petani rendah dan para petani tidak memiliki hak milik atas lahan pertanian mereka, ternyata Banaran mampu menghasilkan produksi pertanian dalam jumlah yang besar. Banaran merupakan salah satu desa yang maju dalam bidang pertanian.

**Tabel 1.5**  
**Persentase Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo Menurut Kecamatan,**  
**2009 (Persen, %)**

Kecamatan	Luas Wilayah
Temon	6,19%
Wates	5,46%
Panjatan	7,61%
Galur	5,61%
Lendah	6,07%
Sentolo	8,98%
Pengasih	10,52%
Kokap	12,59%
Girimulyo	9,36%
Nanggulan	6,76%
Kalibawang	9,03%
Samigaluh	11,82%

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi, Tahun 2009

Banaran merupakan desa yang produktivitas pertaniannya baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 di bawah ini. Tabel 1.6 di bawah ini menunjukkan bahwa Banaran menghasilkan padi terbesar kedua setelah Tirtorahayu yaitu sebesar 35.411,76 ton pada tahun 2009. Pada komoditi kedelai, Banaran merupakan penghasil kedelai paling besar yaitu 124,8 ton pada tahun 2009. Pada komoditi alpokat, Banaran merupakan penghasil alpokat terbesar kedua yaitu sebesar 25,28 ton pada tahun 2009.

Tabel 1.6 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2009, Banaran merupakan desa penghasil mangga terbesar ketiga yaitu sebesar 25,08 ton. Pada komoditi jeruk besar, Banaran merupakan desa dengan produksi

terbesar yaitu sebesar 183,91 ton pada tahun 2009. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa komoditi lain yang dapat dihasilkan Banaran dalam jumlah yang besar yaitu bawang merah dan cabai. Banaran merupakan desa yang produksi bawang merahnya tertinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya yaitu sebesar 378,4 ton. Pada komoditi cabai, Banaran juga merupakan desa yang produksi cabainya tertinggi kedua setelah Pandowan yaitu sebesar 552 ton.

**Tabel 1.6**  
**Banyaknya Produksi Padi, Kedelai, Alpokat, Mangga, Jeruk Besar, Bawang Merah dan Cabai, Tahun 2009 (Ton)**

Desa	Padi	Kedelai	Alpokot	Mangga	Jeruk besar	Bawang merah	Cabai
Karang sewu	34.636,32	42	24,64	25,26	179,14	238,8	384
Banaran	35.411,76	124,8	25,28	25,08	183,91	378,4	552
Kranggan	13.311,72	123	17,6	23,64	18,02	94,6	480
Nomporejo	12.019,32	76,5	15,68	18,9	18,02	189,2	240
Brosot	12.148,56	60,2	17,92	94,8	18,02	94,6	240
Pandowan	7.625,16	73,5	19,52	23,38	18,02	238,8	720
Tirtorahayu	37.996,56	68,6	29,12	28,56	18,02	238,8	240

Sumber: Kecamatan Galur, Data Diolah, tahun 2009-tahun 2010

Banaran yang penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani, jika dilihat dari tingkat kesejahteraannya, dapat dikatakan masyarakat di Banaran sejahtera. Hal tersebut dilihat dari data yang ada bahwa prosentase rumah tangga miskin di Banaran sebesar 5,7 persen dari total rumah tangga yang ada di Kecamatan Galur yang jumlahnya sebesar 7.606 rumah tangga (BPS, 2010).

Melihat keadaan Banaran dengan luas lahan kecil, tingkat pendidikan petani rendah serta sebagian petani di Banaran bagian selatan tidak memiliki hak milik atas lahan pertaniannya, ternyata hasil produksi pertanian di Banaran sangat

bagus dan jumlah rumah tangga miskin relatif kecil. Keberhasilan Desa Banaran dalam sektor pertanian tersebut mengindikasikan bahwa adanya peran kelembagaan tani pada sektor pertanian di Desa Banaran. Hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Banaran terdapat dua kelembagaan pertanian yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Sedyo Rahayu sebagai kelembagaan petani formal dan kelompok tani sebagai kelembagaan petani yang informal. Namun, hasil pra survei di lapangan menemukan fakta bahwa KUD Sedyo Rahayu sudah meninggalkan fungsinya sebagai kelembagaan petani formal bagi para petani di Desa Banaran. Kini KUD Sedyo Rahayu hanya berperan sebagai tempat untuk membayar listrik bagi para petani di Desa Banaran.

Hasil pra survei di lapangan juga menunjukkan bahwa kelompok tani yang merupakan kelembagaan petani informal justru menjadi kelembagaan yang sangat berperan terhadap kemajuan usaha tani di Desa Banaran. Kelompok tani di Desa Banaran dapat dikelompokkan menjadi kelompok tani pesisir pantai dan non pesisir pantai. Oleh karena berbagai penjelasan di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada kelembagaan kelompok tani yang berada di Desa Banaran. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh lagi mengenai dinamika kelembagaan kelompok tani di Desa Banaran serta peran kelembagaan kelompok tani tersebut terhadap kemajuan usaha tani di Desa Banaran. Oleh karena itu usulan judul penelitian ini adalah “Kajian Ekonomi Kelembagaan Kelompok Tani di Desa Banaran (Studi Kasus: Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo).”

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

Menganalisis peran kelembagaan kelompok tani terhadap kemajuan usaha tani.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi sistem kelembagaan kelompok tani di Desa Banaran.
- 2) Mengetahui mekanisme bekerjanya kelembagaan kelompok tani di Desa Banaran.
- 3) Melakukan analisis mengenai peran kelembagaan kelompok tani terhadap kemajuan usaha tani di Desa Banaran.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan mengenai kelembagaan kelompok tani di Kecamatan Galur pada umumnya dan di Desa Banaran pada khususnya.
2. Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi / penelitian yang terkait dengan riset ini.

### **I.5. Sistematika Penulisan**

Penyusunan peneliti ini dilakukan secara sistematis dengan struktur penyusunan sebagai berikut:

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan atau pelaporan.

#### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi konsep dan atau teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengertian latar belakang lahirnya kelembagaan, pengertian institusi/ kelembagaan, perbedaan pengertian antara institusi dengan organisasi, manfaat dan fungsi kelembagaan, karakteristik institusi yang baik dan perubahan institusi, perkembangan ekonomi kelembagaan, hubungan kelembagaan dengan modal sosial. Dalam bab ini juga disajikan studi terkait/penelitian terdahulu yang diacu dalam penelitian untuk skripsi.

#### **BAB III       METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan hal mengenai lokasi riset, data, model, alat analisis, dan batasan operasional yang digunakan dalam riset.

#### **BAB IV        HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil analisis data dengan metode uji one way anova, uji beda data berpasangan serta metode deskriptif dan

selanjutnya menginterpretasikan sesuai dengan permasalahan maupun tujuan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu kesimpulan dan saran (implikasi kebijakan) dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada pengambil kebijakan yang terkait dengan masalah yang diteliti atau kepada peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.